Pengadilan Agama Watampone Kelas I A (307509)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone
Telp./Fax. 0481 – 21018
Email : watampone@pta-makassarkota.go.id
Website : www.pa-watampone.net

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Watampone adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Watampone. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Watampone, 7 Januari 2019
Sekretaris,

H. A. FAJAR SJAM SAWERILONGI,SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	7
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	20
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	28
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI.	Lampiran dan Daftar	34

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A

Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Telp./Fax 0481-21018
WATAMPONE 92715
Email : watampone@pta-makassarkota.go.id
Website : www.pa-watampone.net

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Watampone, 7 Januari 2019

Sekretaris,

H. A. FAJAR SJAM SAWERILONGI,SE.,M.Si
NIP. 197412142006041002

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp9.486.673 atau mencapai 100 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9.486.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp11.689.031.938 atau mencapai 99,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.693.455.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.753.404.910 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp611.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.752.793.910; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.736.484.669 dan Rp11.753.404.910.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.486.547, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp11.836.763.905 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(11.827.277.358). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(333.774) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(11.827.611.132).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp5.752.765.756 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(11.827.611.132)

ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp5.946.865.880 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.864.464.165 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp11.736.484.669.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	9.586.000	9.586.673	100,01	12.204.482
JUMLAH PENDAPATAN		**9.586.000**	**9.586.673**	**100,01**	**12.204.482**
BELANJA	**B.2.**				
Belanja Pegawai	B.3	10.766.223.000	10.766.217.603	100,00	7.293.120.670
Belanja Barang	B.4	758.732.000	754.844.335	99,49	752.574.499
Belanja Modal	B.5	168.500.000	167.970.000	99,69	224.877.000
		-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		**11.693.455.000**	**11.689.031.938**	**99,96**	**8.270.572.169**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	611.000	103.400
Jumlah Aset Lancar		611.000	103.400
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5.238.828.000	1.582.240.000
Peralatan dan Mesin	C.15	1.951.071.028	1.823.896.028
Gedung dan Bangunan	C.16	6.175.578.000	4.642.914.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	19.988.100	19.988.100
Aset Tetap Lainnya	C.18	14.997.470	14.997.470
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.647.668.688)	(2.302.927.612)
Jumlah Aset Tetap		11.752.793.910	5.781.107.986
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	53.245.000	288.738.237
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(53.245.000)	(288.738.237)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		**11.753.404.910**	**5.781.211.386**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	16.920.241	28.445.630
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.920.241	28.445.630
JUMLAH KEWAJIBAN		16.920.241	28.445.630
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	11.736.484.669	5.752.765.756
JUMLAH EKUITAS		11.736.484.669	5.752.765.756
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**11.753.404.910**	**5.781.211.386**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9.486.547	11.154.134
JUMLAH PENDAPATAN		**9.486.547**	**11.154.134**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10.752.065.333	7.315.555.181
Beban Persediaan	D.3	26.589.700	33.069.337
Beban Barang dan Jasa	D.4	418.401.602	386.524.839
Beban Pemeliharaan	D.5	261.398.414	287.189.456
Beban Perjalanan Dinas	D.6	50.240.000	48.340.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	328.068.856	237.903.632
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**11.836.763.905**	8.308.582.445
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(11.827.277.358)**	**(8.297.428.311)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	1.050.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		25.126	164.048
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(358.900)	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(333.774)	1.214.048
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(11.827.611.132)**	**(8.296.214.263)**
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(11.827.611.132)**	**(8.296.214.263)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	5.752.765.756	5.790.612.332
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(11.827.611.132)	**(8.296.214.263)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	5.465.652.780	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	481.213.100	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		**5.946.865.880**	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	11.864.464.165	8.258.367.687
EKUITAS AKHIR	E.5	**11.736.484.669**	**5.752.765.756**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Watampone

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Watampone berkomitmen dengan visi *"**Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung.**"*

Misi Pengadilan Agama Watampone adalah :

a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efesien;
d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efesien;
e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku
2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara
3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin
4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu.
5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril.
6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076.
9) Memaksimalkan upaya mediasi.
10) Percepatan penyelesaian perkara
11) Penyelesaian sisa perkara
12) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu
14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan.
3) Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP)
4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris/BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan.
5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola
6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, Speedy dan telephone) secara tepat waktu.
7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya.
8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN.
9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia.
10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.
11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2017 secara tepat waktu.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Watampone. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Watampone menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Watampone dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Watampone. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak	10

Sirkuit Terpadu.	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Watampone* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9.486.000	9.486.673
Jumlah Pendapatan	**9.486.000**	**9.486.673**
Belanja		
Belanja Pegawai	8.362.373.000	10.766.223.000
Belanja Barang	758.732.000	758.732.000
Belanja Modal	168.500.000	168.500.000
Jumlah Belanja	**9.289.605.000**	**11.693.455.000**

Realisasi Pendapatan Rp9.486.673

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp9.486.673 atau mencapai 100 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9.486.000. Pendapatan Pengadilan Agama Watampone terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	9.486.000	9.486.673	100,01
Pendapatan Lain-lain	-		-
Jumlah	**9.486.000**	**9.486.673**	100,01

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2018 mengalami penurunan 22,27 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan oleh karena menurunnya pendapatan rumah dinas.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN %
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	9.486.673	12.204.482	-22,27
Jumlah	**9.486.673**	**12.204.482**	**-22,27**

Realisasi Belanja Negara Rp11.689.031.938

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2018 adalah sebesar Rp11.689.031.938 atau 91,81% dari anggaran belanja sebesar Rp11.693.455.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10.766.223.000	10.766.219.601	100,00
Belanja Barang	758.732.000	754.844.335	99,49
Belanja Modal	168.500.000	167.970.000	99,69
Total Belanja Kotor	**11.693.455.000**	**11.689.033.936**	99,96
Pengembalian		(1.998)	-
Jumlah	**11.693.455.000**	**11.689.031.938**	99,96

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 41,33% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pegawai disebabkan adanya mutasi Hakim yang masuk, dan kenaikan pangkat PNS.
2. Belanja modal mengalami penurunan, disebabkan alokasi belanja modal dari Mahkamah Agung juga mengalami penurunan..

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.766.217.603	7.293.120.670	47,62
Belanja Barang	754.844.335	752.574.499	0,30
Belanja Modal	167.970.000	224.877.000	(25,31)
Jumlah	**11.689.031.938**	**8.270.572.169**	**41,33**

Belanja Pegawai
Rp10.766.217.603

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.766.217.603 dan Rp7.293.120.670. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan Hakim dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Kenaikan pangkat Pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.766.219.601	7.293.121.273	47,62
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	**10.766.219.601**	**7.293.121.273**	**47,62**
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.998)	(603)	231,34
Jumlah Belanja	**10.766.217.603**	**7.293.120.670**	**47,62**

Belanja Barang
Rp754.844.335

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp754.844.335 dan Rp752.574.499. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 0,30% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja Barang Operasional, Belanja Jasa dan perjalanan sepanjang tahun 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	362.566.415	344.695.987	5,18
Belanja Barang Non Operasional	3.730.900	5.635.000	(33,79)
Belanja Jasa	82.916.206	70.841.856	17,04
Belanja Pemeliharaan	255.390.814	283.061.656	(9,78)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	50.240.000	48.340.000	3,93
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**754.844.335**	**752.574.499**	**0,30**
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	**754.844.335**	**752.574.499**	**0,30**

Belanja Modal Rp167.970.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp167.970.000 dan Rp224.877.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar (25,31)% dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh alokasi belanja modal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, mengalami penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.970.000	224.877.000	(25,31)
Jumlah Belanja Kotor	**167.970.000**	**224.877.000**	**-25,31**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**167.970.000**	**224.877.000**	**-25,31**

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp167.970.000, mengalami penurunan sebesar (25,31) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp224.877.000. Hal ini disebabkan oleh alokasi dana belanja modal peralatan dan mesin TA 2018 lebih kecil dibandingkan TA 2017.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Lemari Besi	36.113.000	0	0,00
Rak Besi	3.795.000	0	0,00
Brandkas	8.250.000	0	0,00
Sice	15.730.000	0	0,00
Tangga Aluminium	2.992.000	0	0,00
Kursi Besi/Metal	10.615.000	35.200.000	-69,84
Lap Top	90.475.000	15.000.000	503,17
P.C. Unit	0	39.900.000	-100,00
Printer	0	10.000.000	-100,00
Televisi	0	20.000.000	-100,00
UPS	0	20.000.000	-100,00
Meja Kerja Kayu	0	56.100.000	-100,00
A.C. Split	0	28.677.000	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	**167.970.000**	**224.877.000**	**-25,31**
Jumlah Belanja	**167.970.000**	**224.877.000**	**-25,31**

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	-	-
Kas di Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	-	-
Kas di Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Persediaan Rp611.000

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp611.000 dan Rp103.400.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	611.000	103.400
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**611.000**	**-**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp5.238.828.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Watampone per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp5.238.828.000 dan Rp1.582.240.000. Kenaikan nilai aset tetap Tanah berasal dari hasil Revaluasi Inventarisasi dan Penilaian BMN pada tanggal 2 Pebruari 2018. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**1.582.240.000**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	3.656.588.000
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2018	**5.238.828.000**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2018

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.308 m2	Jl. Lak. Yos Sudarso No.20 Watampone	1.406.704.000
2	3.424 m2	Jl. Lak. Yos Sudarso No. 49 A Watampone	3.832.124.000
Jumlah			**5.238.828.000**

Peralatan dan Mesin

Rp1.951.071.028

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp1.951.071.028 dan Rp1.823.896.028. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**1.823.896.028**
Mutasi tambah:	
Pembelian	167.970.000
Hibah Barang	12.450.000
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	(53.245.000)
Saldo per 31 Desember 2018	**1.951.071.028**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-1.495.195.370
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**455.875.658**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Pembelian Lemari Besi/Metal berupa *Lemari Berkas* sebanyak 12 buah senilai Rp33.143.000
b. Pembelian Lemari Besi/Metal berupa *Lemari Toga* sebanyak 1 buah senilai Rp2.970.000
c. Pembelian Rak Besi berupa *Lemari Arsip* sebanyak 1 buah senilai Rp3.795.000
d. Pembelian Brandkas sebanyak 1 buah senilai Rp8.250.000.
e. Pembelian Sice berupa *Sofa* sebanyak 1 set senilai Rp15.730.000
f. Pembelian Tangga Aluminium sebanyak 1 buah senilai Rp2.992.000
g. Pembelian Kursi Besi/Metal berupa *Kursi Pimpinan* sebanyak 1 buah senilai Rp10.615.000 dan
h. Pembelian *Laptop* sebanyak 7 unit senilai Rp90.475.000
i. Penerimaan hibah Peralatan dan Mesin berupa *Jam Elektronik* sebanyak 1 buah senilai Rp1.750.000.
j. Penerimaan hibah Peralatan dan Mesin berupa *Televisi* sebanyak 1 buah senilai Rp1.600.000.
k. Penerimaan hibah Peralatan dan Mesin berupa *Filling Cabinet Besi* sebanyak 1 buah senilai Rp1.000.000 dan
l. Penerimaan hibah Peralatan dan Mesin berupa *Lemari Es* sebanyak 6 unit senilai Rp8.100.000.

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan berupa :

a. 2 buah Lap Top Thosiba yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp22.000.000.
b. 1 buah Lap Top Leonovo yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp6.270.000.
c. 1 unit Mesin Absensi yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp24.975.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp6.175.578.000,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp6.175.578.000 dan Rp4.642.914.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**4.642.914.000**
Mutasi tambah:	
Hibah Masuk	172.468.900
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	307.157.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	173.786.100
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	1.809.064.780
Mutasi kurang:	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(929.812.780)
Saldo per 31 Desember 2018	**6.175.578.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016	(150.974.212)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**6.024.603.788**

Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berasal dari :

1. Hibah Masuk berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushalla) senilai Rp172.468.900.
2. Barang Berlebih Hasil Inventarisasi berupa:
   a. Gedung Pos Jaga Permanen sebanyak 2 unit senilai Rp.91.334.000;
   b. Pagar Permanen sebanyak 1 unit senilai Rp.215.823.000.
3. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebanyak 1 unit senilai Rp173.786.100. Koreksi ini berasal dari Hasil Revaluasi Inventarisasi dan Penilaian BMN yang merupakan hibah, akan tetapi oleh KPKNL Pare-Pare dimasukkan sebagai Barang Berlebih.

   Atas petunjuk dari Mahkamah Agung RI, Barang berlebih berupa Gedung Tempat ibadah Permanen dihapus dalam pencatatan simak, selanjutnya, dicatat dalam simak sebagai Hibah (masuk). Kemudian dicatat dalam perubahan BMN, selanjutnya koreksi perubahan nilai sesuai dengan hasil revaluasi KPKNL.
4. Koreksi nilai Tim Penertiban Aset berupa :
   a. Bangunan Gedung senilai Rp670.620.370
   b. Bangunan Tempat Parkir Rp209.961.280

c. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen senilai Rp901.812.360
d. Pagar Permanen senilai Rp26.670.770

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan merupakan koreksi semu hasil penilaian kembali berupa :

a. Bangunan Gedung senilai Rp(830.633.370).
b. Bangunan Tempat Parkir Rp(10.733.280)
c. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen senilai Rp(76.394.360)
d. Pagar Permanen senilai Rp(12.051.770)

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp19.988.100

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp19.988.100 dan Rp19.988.100. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**19.988.100**
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2018	**19.988.100**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	(1.499.106)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**18.488.994**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp14.997.470

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp14.997.470 dan Rp14.997.470. Aset tetap tersebut berupa barang Buku buku Perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**14.997.470**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2018	**14.997.470**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**14.997.470**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp1.700.913.688

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp2.940.000.000 dan Rp2.324.630.952. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2018 dan 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.951.071.028	1.495.195.370	455.875.658
2	Gedung dan Bangunan	6.175.578.000	150.974.212	6.024.603.788
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.988.100	1.499.106	18.488.994
4	Aset Tetap Lainnya	14.997.470	0	14.997.470
Akumulasi Penyusutan		**8.161.634.598**	**1.647.668.688**	**6.513.965.910**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain Rp53.245.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp53.245.000 dan Rp288.738.237. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	**288.738.237**
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	53.245.000
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	(288.738.237)
Saldo per 31 Desember 2016	**53.245.000**
Akumulasi Penyusutan	(53.245.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2016	**-**

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan adalah dari reklasifikasi dari asset tetap ke asset lainnya berupa :
   a. Mesin Absensi yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp24.975.000.
   b. Lap Top sebanyak 3 unit yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp28.270.000.
2. Penghapusan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp(292.449.237).

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(53.245.000)

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp(53.245.000) dan Rp(288.738.237). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan			
Mesin Absensi	24.975.000	24.975.000	0
Lap Top	28.270.000	28.270.000	0
Jumlah	**53.245.000**	**53.245.000**	**0**

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp16.920.241

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp16.920.241 dan Rp28.445.630. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Watampone per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Langganan Internet	4.309.500	Tagihan Internet Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
Langganan Lisrik	5.722.088	Tagihan Listrik Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
Langganan Telepon	80.820	Tagihan Telpon Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
Langganan Air	970.100	Langganan Air Bulan Desember 2018 yang belum dibayar
Belanja Pegawai	5.837.733	Kekurangan Gaji Pegawai bulan Juli s.d Desember 2018
Total	**16.920.241**	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp16.920.241

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp16.920.241 dan Rp28.445.630, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2018 dan TA 2017

Uraian	TH 2018	TH 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	5.837.733	19.990.003
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	11.082.508	8.455.627
Jumlah	**16.920.241**	**28.445.630**

Ekuitas
Rp11.736.484.669

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.753.484.669 dan Rp5.752.765.756. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNBP
Rp9.486.547

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp9.486.547 dan Rp11.154.134. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.639.527	4.495.042	25
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gai	3.847.020	6.659.092	(42)
Jumlah	**9.486.547**	**11.154.134**	(15)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari Sewa tanah untuk kantin dan sewa rumah dinas. Sedangkan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji berasal dari potongan Persekot/Uang Muka Gaji Hakim .

Beban Pegawai
Rp10.752.065.333

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.752.065.333 dan Rp7.315.555.181. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.769.247.100	2.173.731.999	27,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.311	22.412	30,78
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	205.928.800	132.057.490	55,94
Beban Tunj. Anak PNS	60.756.236	42.479.208	43,03
Beban Tunj. Struktural PNS	40.320.000	36.600.000	10,16
Beban Tunj. Fungsional PNS	5.899.550.000	3.744.765.000	57,54
Beban Tunj. PPh PNS	875.420.706	513.754.692	70,40
Beban Tunj. Beras PNS	114.351.180	89.728.380	27,44
Beban Uang Makan PNS	420.592.000	316.761.000	32,78
Beban Tunjangan Umum PNS	4.070.000	2.405.000	69,23
Beban Tunjangan Kemahalan PNS	361.800.000	263.250.000	37,44
Jumlah	**10.752.065.333**	**7.315.555.181**	46,98

Beban Persediaan Rp26.589.700

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp26.589.700 dan Rp33.069.337. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	26.589.700	33.069.337	-20
Jumlah	**26.589.700**	**33.069.337**	-20

Beban Barang dan Jasa Rp418.401.602

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp418.401.602 dan Rp386.524.839. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan pembayaran listrik dan internet Tahun Anggaran 2018. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	256.916.615	217.773.950	17,97
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	921.700	1.288.800	(28,48)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.960.000	57.960.000	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	16.725.000	31.797.700	(47,40)
Beban Bahan	3.730.900	5.635.000	(33,79)
Beban Langganan Listrik	69.570.372	57.963.027	20,03
Beban Langganan Telepon	1.621.665	4.272.362	(62,04)
Beban Langganan Air	10.955.350	9.834.000	11,40
Jumlah	**418.401.602**	**386.524.839**	8,25

Beban Pemeliharaan Rp261.398.414

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp261.398.414 dan Rp287.189.456. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.943.500	193.359.362	(12,63)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.447.314	89.702.294	(3,63)
Beban Persediaan bahan unutk Pemeliharaan	6.007.600	4.127.800	45,54
Jumlah	**261.398.414**	**287.189.456**	(8,98)

Beban Perjalanan Dinas Rp50.240.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp50.240.000 dan Rp48.340.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	50.240.000	48.340.000	3,93
Jumlah	**50.240.000**	**48.340.000**	**3,93**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp328.068.856

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp328.068.856 dan Rp237.903.632. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	176.594.942	144.545.650	22,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	150.974.212	92.858.280	62,59
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	499.702	499.702	-
Jumlah Penyusutan	**328.068.856**	237.903.632	37,90
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**328.068.856**	237.903.632	37,90

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp(333.774)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	1.050.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	126	348	(63,79)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	25.000	163.700	(84,73)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-358.900	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-333.774**	**1.214.048**	(127,49)

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.752.765.756

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.752.765.756 dan Rp5.790.612.332.

Defisit LO
Rp(11.827.611.132)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp(11.827.611.132) dan Rp(8.296.214.263). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp5.465.652.780

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.465.652.780 dan Rp0. Revaluasi Aset tersebut berasal dari revaluasi 2 bidang tanah milik satker di Jl. Lak. Yos Sudarso No. 20 dan 49 A Watampone.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp481.213.100

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp481.213.100 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Gedung dan Bangunan	481.213.100
Jumlah	**481.213.100**

Ekuitas Akhir
Rp11.736.484.669

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp11.736.484.669 dan Rp5.752.765.756.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terjadi perbedaan antara Simak dan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN oleh KPKNL Pare-Pare disebabkan :

1. Hasil Penilaian BMN (Revaluasi), terdapat barang berlebih berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen senilai Rp.346.255.000;
2. Bangunan Tempat Ibadah merupakan Hibah berasal dari Swadana Pegawai senilai Rp.172,468,900;

Atas petunjuk dari Mahkamah Agung RI, Barang berlebih berupa Gedung Tempat ibadah Permanen dihapus dalam pencatatan simak, selanjutnya, dicatat dalam simak sebagai Hibah (masuk). Kemudian dicatat dalam perubahan BMN sebagai koreksi perubahan nilai sesuai dengan hasil revaluasi KPKNL

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : W20-A2/01/KU.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Penunjukan Pengelola Keuangan selama tahun 2018 tidak pernah dilakuka Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran	H. A. Fajar Sjam Sawerilongi, SE.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	Nurhidayah
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	Maftukhah Mustafa, S.Kom
Bendahara	Heriawati, SH

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31-12-2017	Beban Peny. Tahun 2018	Akm. Peny. Per 31-12-2018	Nilai Buku Per 31-12-2016
A	**Tanah**						
1	Tanah	-	**52.388.828.000**	-	-	-	**52.388.828.000**
	Jumlah		**52.388.828.000**	-	-	-	**52.388.828.000**
B	**Peralatan dan Mesin**						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	455.024.828	442.524.828	12.500.000	455.024.828	-
2	Alat Kantor	5	231.228.200	167.225.100	784.640	168.009.740	**63.218.460**
3	Alat Rumah Tangga	5	639.104.800	447.478.150	45.748.502	493.226.652	**145.878.148**
4	Alat Studio	5	24.995.000	8.995.000	4.000.000	12.995.000	
5	Alat Komunikasi	5	25.345.000	25.345.000	-	25.345.000	-
6	Peralatan Pemancar	4	149.985.000	29.997.000	14.998.500	44.995.500	**104.989.500**
7	Komputer Unit	4	307.661.000	156.198.625	34.297.750	190.496.375	
8	Peralatan Komputer	4	129.917.200	106.541.725	10.750.550	117.292.275	**12.624.925**
	Jumlah		1.963.261.028	**1.384.305.428**	**123.079.942**	**1.507.385.370**	**455.875.658**
C	**Gedung dan Bangunan**						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	4.521.645.000	841.366.650	(729.482.900)	111.883.750	**4.409.761.250**
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.371.092.000	76.394.360	(44.508.500)	31.885.860	
3	Tugu/Tanda Batas	50	282.841.000	12.051.770	(4.847.168)	7.204.602	**275.636.398**
	Jumlah		**6.175.578.000**	**929.812.780**	**(778.838.568)**	**150.974.212**	**4.685.397.648**
D	**Jaringan**						
1	Jaringan Listrik	40	19.988.100	999.404	499.702	1.499.106	**18.488.994**
	Jumlah		**19.988.100**	**999.404**	**499.702**	**1.499.106**	**18.488.994**
F	**Aset Tetap Yang Tidak Digunakan**						
1	Alat Kantor	5	24.975.000	27.042.000	(2.067.000)	24.975.000	-
2	Alat Rumah Tangga	5	0	62.599.000	(62.599.000)	-	-
3	Alat Studio	5	0	1.580.000	(1.580.000)	-	
4	Peralatan Pemancar	4	28.270.000	196.180.237	(167.910.237)	28.270.000	-
5	Komputer Unit	4	0	4.915.000	(4.915.000)	-	
6	Peralatan Komputer	4	0	133.000	(133.000)	-	-
	Jumlah		**53.245.000**	**292.449.237**	**-239.204.237**	**53.245.000**	**0**
Total			**60.600.900.128**	**2.607.566.849**	**(894.463.161)**	**1.713.103.688**	**57.548.590.300**

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
PER 31 DESEMBER 2018

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	Perseorangan	Barang	DN	Rp 172.468.900	Rp 172.468.900	Rp -	
2	Perseorangan	Barang	DN	Rp 12.450.000	Rp 12.450.000		
Jumlah				Rp 184.918.900	Rp 184.918.900	Rp -	